

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inflasi merupakan kondisi atau keadaan terjadinya kenaikan harga barang secara terus-menerus yang berlaku pada suatu perekonomian tertentu. Inflasi berdampak luas terhadap makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, daya saing, produktifitas, dan bahkan distribusi pendapatan. Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu inflasi karena tarikan permintaan dan inflasi karena dorongan biaya. Dilihat dari sisi permintaan, pada saat itu terjadi inflasi permintaan barang dan jasa terus meningkat sehingga terjadi peningkatan Pengeluaran total melebihi barang dan jasa (produk) yang tersedia dalam perekonomian (kelebihan pesanan). Kelebihan permintaan ini akan mendorong harga ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan dari sisi penawaran, inflasi disebabkan oleh insentif biaya. Kenaikan biaya Produksi ini akan menyebabkan penurunan produksi dan kenaikan harga produk, yang pada gilirannya menyebabkan harga yang lebih tinggi secara umum (Anggityas, 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan isu jangka panjang yang harus diperhatikan dilakukan oleh masing-masing negara dimana transaksi diharapkan terjadi ekonomi yang sangat cepat. Setiap negara memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama panjang. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan syarat mutlak bagi kemajuan dan pembangunan mensejahterakan bangsa. Jika negara tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal itu akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial baru seperti tingkat kehancuran yang tinggi (Amir et al., 2021).

Table 1.1
Jumlah Inflasi Kabupaten Cirebon
Tahun 2012-2021

| Tahun | Jumlah Inflasi (persen) |
|-------|----------------------------|
| 2012 | 3.36 |
| 2013 | 7.86 |
| 2014 | 7.08 |
| 2015 | 1.56 |
| 2016 | 1.87 |
| 2017 | 4.36 |
| 2018 | 2.80 |
| 2019 | 2.00 |
| 2020 | 1.16 |
| 2021 | 1.81 |

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Cirebon (diolah, 2023)

Inflasi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi tidak berarti kebutuhan akan inflasi dikurangi menjadi nol persen. Inflasi mengalami naik turun Pada tahun 2013 inflasi mencapai 7.86% pada tahun 2015 mengalami penurunan mencapai 1.56% dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2017 sebesar 4.36% lalu mengalami penurunan hingga 2021 sebesar 1.82%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah inflasi di Kabupaten Cirebon tidak stabil setiap tahunnya.

Jika tingkat inflasi nol Persentase ini juga tidak memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi akan menyebabkan stagnasi. Kebijakan akan sangat berarti bagi kegiatan ekonomi, jika memungkinkan menjaga tingkat inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Idealnya, tingkat inflasi harus meningkatkan aktivitas ekonomi sekitar di bawah 5% (Herman, 2017).

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan rangkaian inisiatif kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,

memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan distribusi pendapatan. Masalah ketenagakerjaan atau pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit dihindari oleh suatu negara atau daerah dan dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan masalah ekonomi. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin sejahtera kehidupan masyarakat suatu negara, begitu pula sebaliknya. Keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam memecahkan masalah ekonomi negaranya sendiri dapat dilihat dari ekonomi makro dan mikro negara tersebut. Salah satu indikator ukuran ekonomi makro yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas ekonomi suatu negara adalah inflasi. Perubahan indikator ini akan berdampak pada dinamika pertumbuhan ekonomi. Dari segi ekonomi, inflasi merupakan fenomena monet er di suatu negara dimana fluktuasi inflasi cenderung mengakibatkan gejolak ekonomi. Inflasi adalah fenomena dimana tingkat harga umum meningkat secara terus menerus (Umi, 2017).

Dalam fluktuasi harga komoditas pangan terjadi secara cepat. Adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pangan memerlukan suatu kebijakan stabilisasi harga pangan terdapat tiga keuntungan dari kebijakan stabilisasi harga pangan, yaitu: (1) melindungi petani selaku produsen dari penurunan harga sehingga petani dapat berlaku lebih efisien; (2) melindungi konsumen kelas menengah ke bawah yang berpendapatan rendah dari gejolak peningkatan harga sehingga kebijakan ini dapat menjadi salah satu bentuk social safety net dan (3) menciptakan kondisi makro ekonomi yang lebih stabil sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun inflasi rendah tetapi secara statistik, inflasi lebih sering terjadi daripada deflasi artinya tiap bulan harga-harga produk yang dikonsumsi masyarakat terus mengalami kenaikan walaupun pertambahan kenaikannya tidak besar. Hanya saja jika terakumulasi dalam waktu yang lama, perubahan harga-harga tersebut akan terasa nyata dan besar bagi masyarakat luas (Rahmanta et al., 2020).

Inflasi komoditas pangan yang tidak terkendali tentunya tidak hanya disebabkan oleh kurangnya produksi komoditas pangan itu sendiri, tetapi

juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Permasalahan pada proses distribusi diakibatkan oleh sarana dan prasarana distribusi yang kurang memadai, kondisi geografis yang berpulau-pulau, sentra produksi yang tidak merata. Sistem distribusi dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu: (1) mampu menyampaikan hasil-hasil dari produsen ke konsumen dengan biaya serendah-rendahnya; dan (2) mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan distribusi komoditas tersebut. Distribusi berperan penting agar komoditas yang diproduksi produsen dan diinginkan konsumen tersedia dan diperoleh dalam bentuk, waktu, dan jumlah yang tepat. Hal inilah yang sangat sulit diwujudkan secara konsisten oleh pemerintah dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi (Widia, 2020).

perubahan harga pada komoditas bahan pangan merupakan penyumbang terbesar laju inflasi di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, permintaan bahan pangan pun semakin meningkat namun terkadang penawaran bahan pangan belum cukup memenuhi permintaan yang ada. Hal tersebut dapat meningkatkan harga bahan pangan yang akhirnya mendorong laju inflasi (Rahmanta et al., 2020)

Tabel 1.2
Rata-rata Harga Beras di Indonesia
Tahun 2012-2021

| Tahun | Harga Beras |
|-------|-------------|
| 2012 | Rp. 6.965,- |
| 2013 | Rp. 7.570,- |
| 2014 | Rp. 8.102,- |
| 2015 | Rp. 9.058,- |
| 2016 | Rp. 8.369,- |
| 2017 | Rp. 8.194,- |
| 2018 | Rp. 8.726,- |
| 2019 | Rp. 8.651,- |
| 2020 | Rp. 9.533,- |
| 2021 | RP. 9.059,- |

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Cirebon (diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dinyatakan bahwa selama periode 2012-2021 diidentifikasi rata-rata harga beras tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2012 rata-rata harga beras Rp. 6.965,- mencapai harga Rp. 9.058,- di tahun 2021. Secara kuantitas rata-rata harga beras di Indonesia dari tahun ke tahun tersebut bergerak semakin ke atas.

Pasokan beras nasional Indonesia terbanyak adalah berasal dari kegiatan impor. Oleh karenanya, faktor lain yang bisa memicu naiknya harga beras adalah kurs rupiah terhadap dollar. Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara. Kegiatan impor merupakan satu bentuk perdagangan internasional, sehingga mata uang yang digunakan dengan mata uang asing (dollar) sebagai alat pembayaran. Ketika nilai dari mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang dolar maka terjadi kenaikan harga beli barang impor yang kemudian berpengaruh terhadap harga jual barang di pasar domestik (Adhawiyah et al., 2018).

Tabel 1.3
Jumlah Produksi Beras Perum Bulog
Tahun 2012-2021

| Tahun | Jumlah Produksi Beras Pertahun (Ton) |
|-------|---|
| 2012 | 5.130.681 |
| 2013 | 3.798.429 |
| 2014 | 2.624.799 |
| 2015 | 2.611.583 |
| 2016 | 3.510.101 |
| 2017 | 2.051.341 |
| 2018 | 3.275.884 |
| 2019 | 1.201.265 |
| 2020 | 687.042 |
| 2021 | 1.023.292 |

Sumber: Laporan tahunan Produksi Beras Perum Bulog (diolah, 2023)

Berdasarkan table 1.3 dapat dinyatakan Produksi Beras dari tahun 2012 samapai 2021 jumlah produksi beras yang paling banyak di produksi adalah pada tahun 2012 dan yang paling sedikit jumlah produksi pada tahun 2020 karna pada saat itu terjadi pandemi tet api pada tahun 2021 yang juga masih pandemic mengalami kenaikan.

Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, membuat banyak keunggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan baik masyarakat maupun Negara dan ini menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Indonesia sendiri dari dulu merupakan Negara agraris yaitu Negara yang mengandalkan sektor pertaniannya baik sebagai keunggulan utama maupen sebagai penompang pembangunan. Sekarang sector-sector pertanian dibagi menjadi beberapa subsector yang diantaranya:

Subsector holtikultura, subsector kehutanan, subsector perikanan, subsector perkebunan, subsector pertamabangan, subsector perternakan dan subsector tananman pangan. Sector pertanian adalah sector yang paling dominan dikarenakan penduduk di Indonesia mayoritas penduduknya bekerja sebagai pet ani. Namun pertanian di Indonesia masih belum maksimal dan masih jauh dari harapan, banyak penyebab kurangnya produktifitas pertanian salah satu factor yang mempengaruhi adalah tingkat sumber daya manusia yang tidak lain pet ani yang kurang atau lemahnya penget ahuan tentang pengelolaan lahan pertanian dan hasilnya serta minimnya teknologi yang digunakan dalam pertanian karena masih saat ini pertanian masih menggunakan system manual dan tradisional dalam pengelolaan lahan pertaniannya (Amir et al., 2021).

Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan, sosial, budaya dan politik. Masalah beras bukanlah masalah yang sederhana dan sangat sensitif sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Kesalahan kebijakan perberasan akan berdampak tidak hanya pada kondisi perberasan nasional tet api juga pada berbagai bidang lain yang terkait. Misalnya, jika terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan harga beras melambung tinggi, jika tidak

segera diselesaikan akan berdampak pada kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Oleh karena itu, dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peran pemerintah yang sengaja ikut mengatur perekonomian beras nasional (Anggityas, 2021).

Tabel 1.4
Jumlah Stoc Beras Perum Bulog
Tahun 2012-2021

| Tahun | Jumlah Stock Beras Pertahun (Ton) |
|-------|--------------------------------------|
| 2012 | 2.320.777 |
| 2013 | 2.109.476 |
| 2014 | 1.619.830 |
| 2015 | 1.324.712 |
| 2016 | 1.324.712 |
| 2017 | 1.618.194 |
| 2018 | 945.632 |
| 2019 | 2.193.965 |
| 2020 | 1.877.391 |
| 2021 | 807.919 |

Sumber: Laporan tahunan Produksi Beras Perum Bulog (diolah, 2023)

Persediaan/stock mengandung arti sejumlah barang yang tersimpan dalam gudang-gudang yang dikuasai Perum Bulog pada tahun 2012 stock beras perumbulog mencapai 2.320.77 ton semakin tahun stock perum bulog menurun hingga pada tahun 2021 sangat rendah hanya terdapat 807.919 ton.

Peran beras yang sangat khusus menjadi salah satu alasan penting intervensi pemerintah dalam beras. Tingkat intervensi pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya perubahan peran dari unsur-unsur di atas. menghentikan sama sekali campur tangan pemerintah terhadap beras nasional tidak pernah dilakukan karena risikonya sangat besar. Risiko yang paling berbahaya adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beras

dan kelaparan/gizi buruk. Secara parsial, berbagai perubahan instrumen kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, namun pemerintah tidak pernah secara mendasar mengubah tujuan dari kebijakan perberasan nasional yang selama ini dilakukan yaitu masih seputar menjaga kelangsungan produksi beras dalam negeri, melindungi petani beras dan memastikan kecukupan beras bagi masyarakat sehingga mereka memperoleh akses yang berkelanjutan secara ekonomi dan fisik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anggityas, 2021).

Melihat hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENGARUH HARGA BERAS, PRODUKSI BERAS DAN STOCK BERAS TERHADAP INFLASI DI KOTA CIREBON”** (Studi Pada Perum Bulog Kota Cirebon).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian yaitu:

1. Inflasi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi?

Pada masa hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali, kondisi perekonomian menjadi “lesu” dan sulit berkembang. Masyarakat tidak bersemangat untuk bekerja, menurunkan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi karena nilai mata uang semakin menurun. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi pada suatu tingkat yang rendah dan stabil. Dalam upaya pengendalian laju inflasi, diperlukan koordinasi antara kebijakan pemerintah sebagai otoritas fiskal, dan kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter (Doni, 2018).

2. Inflasi berdampak besar terhadap masyarakat?

Karena semakin tinggi tingkat inflasi maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya

sehingga menimbulkan kemiskinan. Dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (Desrini et al., 2018).

3. Inflasi berdampak terhadap kemiskinan?

Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit, namun di beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam segi hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut. Indonesia adalah negara yang masih tergolong negara berkembang, dan kemiskinan merupakan masalah yang menjadi perhatian (Rezki et al., 2016).

4. Inflasi berdampak terhadap pengangguran?

Masalah ketenagakerjaan atau pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit dihindari oleh suatu negara atau daerah dan dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan masalah ekonomi. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Semakin rendah tingkat pengangguran, semakin sejahtera kehidupan masyarakat suatu negara, begitu pula sebaliknya. Keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam memecahkan masalah ekonomi negaranya sendiri dapat dilihat dari ekonomi makro dan mikro negara tersebut. Salah satu indikator ukuran ekonomi makro yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas ekonomi suatu negara adalah inflasi (Umi, 2017).

5. Inflasi menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pangan?

Adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pangan memerlukan suatu kebijakan stabilisasi harga pangan terdapat tiga keuntungan dari kebijakan stabilisasi harga pangan, yaitu melindungi petani selaku produsen dari penurunan harga sehingga petani dapat berlaku lebih efisien, melindungi konsumen kelas menengah ke bawah yang berpendapatan rendah dari gejolak peningkatan harga sehingga kebijakan

ini dapat menjadi salah satu bentuk social safety net dan menciptakan kondisi makro ekonomi yang lebih stabil sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi (Rahmanta et al., 2020).

6. Inflasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat?

Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan, sosial, budaya dan politik. Masalah beras bukanlah masalah yang sederhana dan sangat sensitif sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Kesalahan kebijakan perberasan akan berdampak tidak hanya pada kondisi perberasan nasional tetapi juga pada berbagai bidang lain yang terkait. Misalnya, jika terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan harga beras melambung tinggi, jika tidak segera diselesaikan akan berdampak pada kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Oleh karena itu, dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peran pemerintah yang sengaja ikut mengatur perekonomian beras nasional (Anggityas, 2021).

7. Inflasi yang disebabkan kenaikan harga beras berdampak terhadap masyarakat menjadi kelaparan/gizi buruk?

Peran beras yang sangat khusus menjadi salah satu alasan penting intervensi pemerintah dalam beras. Tingkat intervensi pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya perubahan peran dari unsur-unsur di atas. Menghentikan sama sekali campur tangan pemerintah terhadap beras nasional tidak pernah dilakukan karena risikonya sangat besar. Risiko yang paling berbahaya adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beras dan kelaparan/gizi buruk (Adhawiyah et al., 2018)

8. Harga beras berpengaruh terhadap inflasi?

Peran beras yang sangat khusus menjadi salah satu alasan penting intervensi pemerintah dalam beras. Tingkat intervensi pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya perubahan peran dari unsur-unsur di atas. Menghentikan sama sekali campur tangan pemerintah terhadap beras nasional tidak pernah dilakukan karena risikonya sangat besar.

Risiko yang paling berbahaya adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beras dan kelaparan/gizi buruk. Secara parsial, berbagai perubahan instrumen kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, namun pemerintah tidak pernah secara mendasar mengubah tujuan dari kebijakan perberasan nasional yang selama ini dilakukan yaitu masih seputar menjaga kelangsungan produksi beras dalam negeri, melindungi petani beras dan memastikan kecukupan beras bagi masyarakat sehingga mereka memperoleh akses yang berkelanjutan secara ekonomi dan fisik (Anggityas, 2021).

9. Produksi beras berpengaruh terhadap inflasi?

Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sukirno, 2011).

10. Stock beras berpengaruh terhadap inflasi?

Berbagai perubahan instrumen kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, namun pemerintah tidak pernah secara mendasar mengubah tujuan dari kebijakan perberasan nasional yang selama ini dilakukan yaitu masih seputar menjaga kelangsungan produksi beras dalam negeri, melindungi petani dan memastikan kecukupan beras bagi masyarakat sehingga mereka memperoleh akses yang berkelanjutan secara ekonomi dan fisik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anggityas, 2021).

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitiannya dalam beberapa hal di antaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya akan membatasi masalah apakah harga beras berpengaruh terhadap inflasi pada Perum BULOG cabang Cirebon?

2. Penelitian ini hanya akan membatasi masalah apakah produksi beras berpengaruh terhadap inflasi pada Perum BULOG cabang Cirebon?
3. Penelitian ini hanya akan membatasi masalah apakah stock beras berpengaruh terhadap inflasi pada Perum BULOG cabang Cirebon?
4. Penelitian ini hanya akan membatasi masalah apakah inflasi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Perum BULOG cabang Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah harga beras berpengaruh terhadap inflasi pada perum Bulog cabang Cirebon?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah produksi beras berpengaruh terhadap inflasi beras pada perum Bulog cabang Cirebon?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah stock beras berpengaruh terhadap inflasi beras pada perum Bulog cabang Cirebon?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah inflasi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan yang didapat dalam kegiatan akademik sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai implementasi serta fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah inflasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka dari itu isi yang tertera pada skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab yang berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka memuat rincian terkait Landasan Teori yang berisi tentang, pengaruh harga beras, produksi beras, stock beras terhadap inflasi di Kota Cirebon. Kemudian terdapat uraian terkait penelitian terdahulu untuk mengetahui gambaran dari penelitian sebelumnya mengenai judul terkait, adanya gambaran kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan jenis penelitian, lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian, memaparkan metode yang akan digunakan dalam penelitian, sumber data yang digunakan, populasi dan perhitungan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pengolahan data yang didapat dan pemecahan masalah sesuai dengan teori dan analisis yang digunakan. Serta menganalisis pengaruh harga beras, produksi beras dan stock beras terhadap inflasi pada perum bulog cabang Cirebon.

BAB V: PENUTUP

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran terkait.

